

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Deni Elid Rizki

¹ Universitas Majalengka, Majalengka
elidrizki@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has the potential to achieve prosperity and eliminate unemployment, poverty, and hunger if the government and society can collaborate in managing resources effectively. However, many Indonesians still struggle to meet their basic food needs due to poverty. Poverty remains a global issue, particularly in Indonesia, and continues to be a relevant social problem, especially as economic crises exacerbate it. This study uses qualitative research to describe and understand the effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Sukaraja Kulon Village, Majalengka. According to beneficiaries, BPNT has been effective in reducing the burden of food costs. Regular data verification and program monitoring improve the quality of food sold in E-Warong shops. Additionally, beneficiaries find it easier to report issues with the program. The success of BPNT is evident from the improved public understanding due to effective socialization and the noticeable benefits in reducing food expenditures and providing more balanced nutrition for recipients.

Keywords: *effectivity, food, helps, family, non cash*

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kesejahteraan dan menghilangkan pengangguran, kemiskinan, serta kelaparan apabila pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama mengelola sumber daya secara efektif. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan karena kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah global, terutama di Indonesia, dan menjadi masalah sosial yang relevan, khususnya ketika krisis ekonomi memperburuk keadaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan memahami efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukaraja Kulon, Majalengka. Menurut penerima bantuan, BPNT telah efektif dalam mengurangi beban biaya pangan. Verifikasi data dan pemantauan program secara rutin meningkatkan kualitas pangan yang dijual di E-Warong. Selain itu, penerima bantuan lebih mudah melaporkan masalah yang terjadi. Keberhasilan BPNT terlihat dari peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi yang efektif serta manfaat nyata berupa pengurangan pengeluaran pangan dan pemberian nutrisi yang lebih seimbang bagi penerima.

Kata-kata Kunci: *Efektivitas;Pangan; Bantuan ; Keluarga; Non Tunai*

Korespondensi: Deni Elid Rizki. Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Majalengka, Majalengka 45418,

WhatsApp: 085225160495 **Email:** elidrizky@gmail.com

Submitted: Juli 2024 | **Accepted:** Agustus 2024 | **Published:** September 2024

E-ISSN | **Website:** <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jumash/>

PENDAHULUAN

Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerja sama dengan bank penyalur BPNT atau biasa disebut E-Warong (elektronik warong). Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur sesuai dengan kebutuhan di E-Warong. BPNT diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sebesar RP 110.000, yang di transfer setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik yang memiliki sistem saving account dan e-Wallet/ dompet elektronik, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial tersebut untuk membeli bahan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa atau tidak digunakan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Program BPNT diterapkan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberi nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan (Peraturan Presiden RI, 2017) tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

BPNT dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran bantuan sosial, serta mendorong keuangan inklusi. Kabupaten Majalengka termasuk dalam penerima BPNT, berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Sosial jumlah penerima BPNT khususnya di Desa Sukaraja Kulon pada tahun 2021 mencapai 882 KPM, dan pada tahun 2022 mencapai 781 KPM. Jika dilihat, terdapat penurunan jumlah penerima manfaat di Desa Sukaraja Kulon.

Perubahan tersebut setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan data penerima, perpindahan domisili ke wilayah lain namun masih tercatat di lokasi tempat tinggal awal, penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima program BPNT, serta status keluarga yang mengalami peningkatan atau penurunan menjadi sejahtera. Setelah kurang lebih tiga tahun berjalannya program BPNT, tapi kenyataannya program ini masih terdapat kurang optimal dengan perencanaan awal di Desa Sukaraja Kulon. Kurangnya kuota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga menyebabkan beberapa masyarakat miskin belum menerima program tersebut dan menimbulkan reaksi kecemburuan sosial di tengah masyarakat

karena beberapa warga yang semestinya masuk ke dalam komponen penerima manfaat namun tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan non tunai.

Dikutip dari buku administrasi perkantoran (DW Sutha:2018) Secara etimologi kata Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Ad yang memiliki arti intensif dan ministrare yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam bahasa Inggris “administration”. Menurut KBBI administrasi adalah usaha dan kekuatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha. Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat Siagian dikutip dari buku Metode Penelitian Administrasi Publik mendefinisikan “Administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (2020:50).

Menurut Dimock & Dimock dalam buku Metode Penelitian Administrasi Publik, mengatakan bahwa “administrasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya” (2020:50). Sedangkan menurut The Liang Gie yang dikutip dari buku Teori Administrasi Publik mendefinisikan “administrasi adalah serangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu” (2019:3).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukaraja Kulon Kabupaten Majalengka. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk

mendeskripsikan, menginterpretasikan suatu fenomena secara umum tentang masalah yang diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam mengenai efektivitas program bantuan pangan non tunai di Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Majalengka dalam hal ini di Kantor Desa Sukaraja Kulon dan Masyarakat penerima bantuan di Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Desa Sukaraja Kulon terletak di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dengan luas Wilayah 250 Hektar yang terdiri dari 5 Dusun/Blok, yaitu dusun Ciburuy, Cikonde, Pajaten, Sarongge, dan Leuwi Kijing. Penduduk desa ini ada sekitar 6962 jiwa yang terdiri dari 2670 laki-laki dan 2588 perempuan, tersebar di 5 Rukun Warga dan 20 Rukun Tetangga. Desa ini berada di dataran rendah, dengan ketinggian +78 Meter DPL (Diatas Permukaan Laut), sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian/ sawah/tegalan dengan permukaan tanah datar. Batas wilayah Desa Sukaraja Kulon di sebelah Utara adalah Desa Andir dan Burujulwetan, di sebelah Selatan adalah Desa Pinangraja, di bagian Timur adalah Desa Sukarajawetan, dan di bagian Barat adalah Desa Wanajaya dan Karayunan. Berdasarkan laporan yang ada dalam RPJMDes Sukaraja Kulon tahun 2015, Desa Sukaraja dimekarkan pada tanggal 11 Maret 1981 yaitu menjadi desa Sukarajawetan dan Desa Sukarajakulon. Desa Sukarajawetan menjadi induk Desa Sukaraja dan Desa Sukarajakulon merupakan Desa Pemekaran dari Desa Sukaraja dengan batas wilayah Jalan raya Jatiwangi- Majalengka (Jl veteran Pejuang).

Penelitian ini akan difokuskan pada Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Sukaraja Kulon Kabupaten Majalengka, sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Program: Dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui sosialisasi tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- 2) Tepat sasaran : Program BPNT hanya diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar. KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana. Sumber data KPM adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM).
- 3) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi pangan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi yaitu setiap awal bulan.

- 4) Tercapainya tujuan ; diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan. melihat dari sejauh mana keberhasilan aparaturnya dalam mendistribusikan bantuan pangan non tunai. Apakah program yang dilaksanakan bermanfaat bagi yang menerima atau tidak.
- 5) Perubahan nyata : diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata kepada masyarakat setempat.

Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder penulis menggunakan pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukaraja Kulon.

3. Dokumentasi

Bentuk lain dari data kualitatif adalah dokumen. Dokumen yang digunakan berhubungan dengan observasi yang dilakukan atau mendukung wawancara dan observasi peneliti. Dokumen yang ditulis sendiri oleh informan atau tulisan tentang mereka seperti sebagai autobiografi, memo, dokumen kebijakan, dokumen lain dapat ditemukan dalam file-file organisasi, dan arsip – arsip sejarah.

Adapun Langkah-langkah untuk menganalisis data yang ada dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtiarikan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat polapola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi.

Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terperinci, peneliti akan menjabarkan hasil wawancara dari nerasumber yang terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan indikator penelitian:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program bertujuan untuk menganalisis seberapa baik sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam memberikan pemahaman mengenai program BPNT khususnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaksana sosialisasi adalah Tim Koordinasi Bantuan Pangan Kabupaten Majalengka, pendamping sosial, aparatur daerah, serta bank penyalur. Program BPNT ini dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa sosialisasi ke masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan program dan pemanfaatan BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan KPM. Selain itu, tahap registrasi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dilakukan sebagai berbentuk pendataan dan survey kepada KPM agar bantuan BPNT tersebut dapat disalurkan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak Dinas Sosial Kabupaten Majalengka bidang Kesejahteraan Sosial, mengatakan bahwa:

“Setiap program yang dilakukan dinas sosial selalu ada sosialisasinya termasuk program BPNT supaya masyarakat juga paham mengenai tujuan bantuan ini. Di setiap kecamatan ada sosialisasinya kepada keluarga penerima manfaat dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan petugas pendamping BPNT.” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2024)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh salah satu Pegawai di Divisi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi BPNT diadakan oleh KorDa (Koordinator Daerah) yang mengundang semua agen penyalur seperti Bulog, Polda selaku pendamping Bansos, jadi ada sosialisasi yang diadakan di satu tempat tatapi KorDa yang adakan kami hanya datang mendampingi dan melihat. Sosialisasi BPNT biasa diadakan setiap bulan namun tidak menentu tergantung anggaran sosialisasi Kemensos.” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2024)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK Jatiwangi) Kabupaten Majalengka, bahwa:

“Sosialisasi sudah dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang BPNT. Pelaksanaan program BPNT sudah berjalan sejak 2017 dan kami juga melakukan pendataan kepada keluarga penerima bantuan, untuk warga yang berhak menerima BPNT harus menyerahkan berkas seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, dan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2024)

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari beberapa masyarakat penerima BPNT, berikut penjelasannya: Informan DN, mengatakan bahwa :

“Pernah ada sosialisasi di Kantor Camat tapi saya tidak datang karena cuma perwakilan saja seperti ketua RW baru nanti dia yang menjelaskan ke warganya”. (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2024)

Kemudian ditambahkan oleh informan berinisial HA, mengatakan bahwa:

“ada sosialisasi tetapi saya jarang pergi karna saya juga sudah tua nak baru jauh juga tempatnya. Biasanya ada orang kelurahan yang datang untuk informasikan kalau tentang bantuan ini”. (wawancara pada tanggal 6 Januari 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam memberikan pemahaman tentang program BPNT kepada masyarakat yaitu dengan melakukan Sosialisasi program BPNT. Dalam metode sosialisasi BPNT yaitu pihak KorDa (Koordinator Daerah) mengundang pihak terkait dalam penyaluran bantuan, seperti Bulog, Polda, pendamping BPNT Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, dan pihak bank terkait (Bank BRI untuk wilayah Kabupaten Majalengka) serta mengundang aparat daerah untuk mengikuti sosialisasi tersebut, aparat daerah inilah yang akan menyampaikan kepada masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Jatiwangi terkait program BPNT. Sejauh ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima, mereka cukup memahami mekanisme penyaluran program BPNT selama ini mereka terima, dimana pemerintah sebagai penyelenggara program BPNT dapat memberikan informasi yang jelas kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), begitupun masyarakat sebagai penerima program BPNT bisa menerima informasi terkait mekanisme program tersebut.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran menunjukkan apa yang dikehendaki menjadi tercapai atau menjadi kenyataan atau dengan kata lain berarti sasaran yang ingin dicapai sesuai rencana. Indikator ini

digunakan untuk mengukur apakah penyaluran program BPNT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dalam menentukan sasaran program BPNT diperlukan sistem informasi yang baik dan pembinaan yang dilakukan secara intensif. Apakah program yang dilaksanakan bermanfaat bagi yang menerima atau tidak. sehingga indikator ini penting digunakan untuk mengetahui efektivitas program.

Dalam penentuan calon penerima program BPNT yang ditetapkan oleh kemensos adalah masyarakat yang termasuk dalam kelompok Desil 2 (kelompok rumah tangga miskin dengan peringkat kesejahteraan terendah mencapai 10-20 %) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kriteria penerima bantuan sosial adalah Kartu Keluarga yang telah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada tahun 2020, Kementerian Sosial mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dengan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran pada DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kemensos dan Pemerintah Daerah. Hal ini dibenarkan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Jatiwangi, mengatakan bahwa:

“Kriterianya sangat sulit digambarkan karena kita tidak diberi kewenangan untuk menentukan siapa penerima BPNT, kita hanya mengisi form nasional seperti rumahnya apa? dindingnya apa?, lantainya apa?,dll. Setelah kita mengisi form kemudian kita kirim melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Berdasarkan form itu, kriteria untuk masuk sebagai penerima bantuan ditentukan oleh Kemensos berdasarkan rumus yang mereka gunakan”. (6 Januari 2024)

Pihak Dinas Sosial Kabupaten Majalengka juga mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan data penerima bantuan yang diterima dari Kementerian Sosial kita salurkan bantuannya kepada penerima BPNT yang terdaftar dan disetiap kecamatan ada koordinator yang bertanggung jawab di lapangan ”. (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2024)

Informan RL selaku salah satu KorDa di kecamatan Jatiwangi, mengatakan bahwa:

“kalau terkait yang menerima bantuan ini rata-rata memang layak mendapatkan bantuan, tetapi tidak bisa di pungkiri kalau masih ada juga masyarakat yang bisa di bilang “cukup” tapi masih terima juga,ada juga yang sudah meninggal tapi namanya masih ada sebagai penerima, kita sudah laporkan di pihak kelurahan tapi mungkin datanya ada bermasalah jadi dia masih terima sampai sekarang”. (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, program BPNT di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka bisa dikatakan masih kurang tepat sasaran. Hal ini didasari oleh beberapa pengaduan dari beberapa pendamping program dan masyarakat kepada Koordinator Daerah yang menangani program BPNT yang masih mengeluhkan mengenai sasaran penerima program BPNT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Hal ini dikarenakan data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kemensos) yang menjadi dasar penentuan bagi penerima program BPNT belum diperbarui secara maksimal, yang menyebabkan data penerima bantuan kemiskinan hanya berputar di data lama saja dan masih terdapat kesalahan data seperti: kesalahan nama penerima, penerima yang sudah meninggal namun masih terdaftar maupun penerima yang berpindah domisili namun masih terdaftar di alamat yang lama. Selain itu, tidak adanya kejelasan mengenai pembagian tingkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) bagi masyarakat yang berhak menerima program bantuan kemiskinan dari pemerintah karena pendataan yang dilakukan oleh daerah hanya sebatas mendata masyarakat berdasarkan form pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), kemudian data tersebut dikelola di pusat untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan menerima penyaluran bantuan tersebut berdasarkan data yang diisi oleh Pemerintah daerah yang kemudian Pemerintah pusat menetapkan keluarga yang berhak menerima program bantuan kemiskinan.

3. Tepat Waktu

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu pelaksanaan suatu program dengan target waktu yang direncanakan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah penyaluran BPNT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Berdasarkan pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2019 yang disusun oleh Kementrian/Lembaga lintas sektor terkait, penyaluran dana BPNT ke rekening BPNT keluarga penerima manfaat (KPM) dijadwalkan setiap tanggal 10(sepuluh)/ bulan. Penyaluran BPNT dilakukan oleh pihak bank yang menjalin kerjasama dengan Kemensos untuk Kabupaten Majalengka sendiri dilakukan oleh bank BRI. Pencairan bantuan kepada KPM berdasarkan data yang diterima dari Kemensos melalui bank penyalur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penerima BPNT berinisial ID di Kecamatan Jatiwangi, mengatakan bahwa:

“kalau mengenai waktu pengambilannya biasanya pertengahan bulan, tanggal dua puluh-an, tidak menentu ki juga biasa tanggal dua puluh lima atau dua puluh enam, dan biasa di informasikan dari kelurahan kalau bisami ambil bantuan di E-Warong”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Ditambahkan oleh salah satu penerima bantuan berinisial M, mengatakan bahwa:

“waktu penukaran bantuannya tidak menentu dek biasanya saya tanggal lima belas ku gesek kartunya di E-Warong”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara dengan petugas E-Warong sebagai tempat penukaran program BPNT, mengatakan bahwa:

“kalau untuk waktu penukaran bantuannya itu tidak menentu karena saldonya kan tidak rutin masuk terkadang dibawah tanggal 10 terkadang tanggal 10 keatas, yang penting saya sebagai penyalur kalau masuk hari ini saldonya dan besok datang pangannya dari Bulog saya adakan penyaluran. kalau untuk waktu penyalurannya ke masyarakat biasanya seminggu. Untuk kendalanya terkadang mereka lagi pergi kerja atau pulang kampung jadi biasanya kita suruh datang bersamaan mereka tidak bisa”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para penerima program BPNT dapat diketahui ketepatan waktu penyaluran bantuan BPNT masih kurang efektif. Salah satu penerima BPNT merasa kecewa karena waktu penyaluran bantuan yang tidak menentu setiap bulannya, sehingga mereka harus menutupi kebutuhan pangan keluarga mereka sendiri hingga saldo BPNT dapat di tukarkan pada E-Warong. Hal ini dikarenakan penyaluran bantuan BPNT yang rencana disalurkan rutin setiap awal bulan namun pada kenyataannya sering mengalami keterlambatan yang dikarenakan saldo dari pusat belum masuk ke rekening KPM. Keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Dinas Sosial karena pihak pusat bekerja sama langsung dengan pihak bank BRI yang merupakan bank penyalur untuk BPNT wilayah Kabupaten Majalengka untuk penyaluran dana bantuan. Adapun tugas dari dinsos untuk mengevaluasi dan menyampaikan keluhan-keluhan dari KPM tentang keterlambatan penyaluran bantuan.

4. Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan dari program BPNT dapat dilihat dari terwujudnya harapan dari adanya program BPNT ini yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat berupa pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan serta derajat kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Bantuan pangan non tunai hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai dengan kebutuhan di E-Warong. Bantuan tersebut dapat dapat disisakan dan akan terakumulasi dalam rekening BPNT. Penentuan komoditas pangan dalam program BPNT bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi permintaan dari penerima. Informan DI selaku salah satu penerima BPNT, mengatakan bahwa:

“bantuannya waktu itu berupa 10 kg beras sama 2 rak telur, sama ada juga ayamnya tapi kecil dan sekali itu saja bulan lalu (Desember 2023) tapi setelah itu tidak pernah lagi”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Kemudian, informan S mengatakan bahwa:

“bantuan yang ku terima itu beras sama telur, kalau ayam tidak ada tapi ada penambahan jumlah jadi waktu itu ku terima 15kg beras sama 2 rak telur”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Berbeda dengan hasil wawancara bantuan yang diterima oleh penerima BPNT, pihak pengelola TSKS Jatiwangi lebih mendetail menjelaskan mengenai progres jumlah penerima program BPNT, sebagaimana hasil wawancara yang di dapatkan sebagai berikut:

“sekarang programnya kita itu menggraduasi artinya mengeluarkan, kalau sudah dianggap tidak layak lagi menerima bantuan harus dikeluarkan oleh pendamping BPNT dan setiap 4 bulan diverifikasi sesuai fakta dilapangan. Kalau dilihat dari jumlah penerima BPNT yang berkurang setiap tahun berarti tujuan dari program ini berhasil karena masyarakat merasa terbantu, tetapi untuk tahun 2020 itu ada peningkatan karena adanya pandemic covid-19 ini”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Di Kabupaten Majalengka program BPNT sudah dimulai sejak tahun 2017. pada tahun 2017 jumlah penerima BPNT sebanyak 3.100 KPM dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2.782 KPM. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 3.689 KPM dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah mencapai 4.600 KPM hal ini disebabkan karena perubahan program menjadi Sembako Murah pada akhir 2019 semenjak pergantian Menteri

Sosial dan adanya pandemi covid-19. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Jatiwangi pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

	bps_kode_kecamatan	bps_nama_kecamatan	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	jumlah	satuan	tahun
A	3210050	ARGAPURA	32.10.05	ARGAPURA	2111	KELUARGA	2022
A	3210041	BANJARAN	32.10.22	BANJARAN	1643	KELUARGA	2022
A	3210020	BANTARUJEG	32.10.02	BANTARUJEG	3685	KELUARGA	2022
A	3210080	CIGASONG	32.10.20	CIGASONG	2023	KELUARGA	2022
A	3210030	CIKIJING	32.10.03	CIKIJING	4436	KELUARGA	2022
A	3210031	CINGAMBUL	32.10.23	CINGAMBUL	3356	KELUARGA	2022
A	3210150	DAWUAN	32.10.12	DAWUAN	2136	KELUARGA	2022
A	3210190	JATITUJUH	32.10.15	JATITUJUH	1804	KELUARGA	2022
A	3210140	JATIWANGI	32.10.11	JATIWANGI	4604	KELUARGA	2022
A	3210170	KADIPATEN	32.10.13	KADIPATEN	2455	KELUARGA	2022

Gambar 4.2 Sumber Gambar : Webs

ite PENDATA Kabupaten Majalengka

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, tujuan dari program BPNT telah tercapai. Pemberian nutrisi yang seimbang dan melihat dari jumlah penerima program BPNT yang mengalami penurunan sejak tahun 2018 membuktikan bahwa masyarakat semakin sejahtera dengan adanya program ini Akan tetapi, berdasarkan indikator sebelumnya masih belum maksimalnya ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan ini yang perlu ditingkatkan. Sehingga dalam indikator tercapainya tujuan program BPNT di Kecamatan Jatiwangi sudah cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan keluarga penerima bantuan, di sisi lain pemerintah perlu meningkatkan evaluasi data dan survey lapangan untuk memperbaharui data terpadu kesejahteraan sosial masyarakat yang menjadi acuan dalam menentukan penerima bantuan di Kecamatan Jatiwangi serta memberikan kejelasan waktu penyaluran BPNT bagi penerima.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya di Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi sebelum dan sesudah menerima program BPNT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Program BPNT diharapkan mampu merubah keadaan sosial ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan

masyarakat rentan miskin. Dengan Adanya program BPNT ternyata kondisi kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang cukup baik.

Hal ini dibenarkan Ibu SA salah satu penerima program BPNT di kecamatan Jatiwangi yang mengatakan bahwa:

“perubahan yang paling saya rasakan itu terbantu untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, dan penerima juga harus pintar-pintar mengelola bantuan supaya cukup”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu HA, bahwa:

“saya rasa sudah baik karena ada sedikit bantuan untuk membantu kehidupan kami sehari-hari, program ini juga mengurangi beban hidup karena pendapatanku yang tidak menentu”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Pernyataan diatas didukung oleh informan MA, mengatakan bahwa:

“tahun-tahun sebelumnya kualitas berasnyakurang baik, tapi tahun ini kualitas berasnya sudah cukup baik dan beban pengeluaran juga berkurang karena adanya bantuan ini”. (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti, perubahan nyata yang dapat dilihat di Kecamatan Jatiwangi sudah efektif. Menurut keluarga penerima bantuan, BPNT telah berjalan dengan baik dan mampu mengurangi beban kebutuhan pangan keluarga penerima bantuan dan juga petugas setiap tahunnya melakukan verifikasi data dan memantau jalannya program BPNT. Dengan pemantauan dan kerjasama yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas pangan yang dijual di E-Warong. KPM juga diberikan kemudahan dalam melakukan pengaduan jika ditemukan masalah pada saat pelaksanaan program BPNT. Program BPNT dalam pencapaian tujuan pada pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan perubahan yang nyata pada setiap elemen dalam program ini. Pemerintah diharapkan mampu meng-update data maupun teknologi serta mampu merubah tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera untuk perubahan yang lebih baik.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukaraja Kulon Kabupaten Majalengka, menemui beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mencapai efektivitas program. Faktor pendukung tersebut meliputi :

1. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menerima program BPNT untuk mengetahui informasi mekanisme penyaluran BPNT
2. Lokasi E-Warong/tempat penukaran BPNT yang strategis. Jarak antara E-Warong/tempat pencairan bantuan dengan tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak begitu jauh, di setiap kelurahan memiliki minimal satu E-Warong/tempat penukaran bantuan
3. Infrastruktur pendukung yang memadai, seperti mesin EDC bank dalam kondisi baik pada saat waktu pencairan program BPNT
4. Komitmen pemerintah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan program BPNT dengan melakukan verifikasi data penerima program BPNT

Sedangkan faktor penghambat dalam mencapai efektivitas program BPNT di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, meliputi :

1. Data penerima BPNT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial masih kurang valid, dikarenakan masih terdapat duplikasi data, kesalahan nama penerima, meninggal dunia, perpindahan domisili penduduk yang masih tercatat sebagai penerima
2. Waktu pelaksanaan program BPNT yang direncanakan akan diberikan rutin setiap bulannya kepada keluarga penerima manfaat masih sering mengalami keterlambatan yang disebabkan karena waktu pencairan dana dari pusat yang tidak menentu.

SIMPULAN

Berdasarkan dari analisis hasil wawancara dan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukaraja Kulon Kabupaten Majalengka sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari analisis teori yang digunakan, yaitu : pemahaman masyarakat mengenai program BPNT dapat dikatakan baik dikarenakan sosialisasi yang dilakukan di masyarakat telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyaluran BPNT, tujuan dari adanya program BPNT juga telah terlaksana dengan baik, masyarakat sudah merasakan manfaat dari adanya bantuan ini yang dapat mengurangi beban pembelian kebutuhan pangan KPM, serta perubahan nyata yang dirasakan masyarakat yang sudah terbantu khususnya

dalam hal pengeluaran pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Meskipun di sisi lain, masih ada hal yang perlu diperbaiki pada program ini seperti dikarenakan ketepatan sasaran penerima bantuan program BPNT dapat dikatakan masih kurang tepat melihat masih terdapat duplikasi data yang terdaftar dalam penerima BPNT. Begitu juga waktu program BPNT yang direncanakan akan diberikan rutin setiap bulannya kepada KPM masih sering mengalami keterlambatan yang disebabkan karena pencairan dana dari pusat yang tidak menentu sehingga ketepatan waktu dari program BPNT belum efisien dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Peraturan Presiden RI. (2010).
- Pratama, & Fauzi. (2018). *Efektivitas Program Bimbingan Kerja dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara*. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*.
- Tiara Rohana, M. (2019). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang*. *Demography Journal of Sriwijaya*, Vol. 6, No.
- Toad, V. S., Rares, J., & Pombengi, J. (2018). *Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado*. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58).
- Wahab. (2004). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Jurnal:

Agustino. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Anas, M. A. (2017). Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan Green and Clean (LGC) di Kabupaten Lamongan. Universitas Airlangga.

Bdt.tnp2k.go.id. (2018). Tanya Jawab Umum Berbasis Data Terpadu.

Budiani, N. W. (2005). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna " Eka Taruna Bhakti " Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Ekonomi Dan Sosial (Unud).

Citra Utama. Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Universitas Diponegoro.

Dini, A. R. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Djabbar Ramlawati. (2013). Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. Universitas Hasanuddin.

Gunawan, H. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Iqbal, M. Z. K. (2018). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kota Malang (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang dan Unit Pelaksana Teknis Malang Utara dan Batu Periode Tahun 2016 dan 2017). Universitas Brawijaya.

Junaidi, M. S. (2018). Komparasi Kepuasan Penerima Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Dan Penerima Rastra Di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan. <https://doi.org/10.21009/Econosains.0152.08>

Lestari, R. P., & Murti, I. (2015). Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri)(Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. 195–201.

Dokumen:

Kemensos.go.id. (2019). Kemensos dan Perum Bulog Bersinergi Menyalurkan BPNT.

Kementerian Sosial, & dkk. (2017). Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Kementerian Sosial, & Dkk. (2019). Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden RI. (2017).

Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Undang-Undang. (2011). Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Berhak Memperoleh Kecukupan Pangan, Sandang, dan Perumahan.

Undang-Undang RI. (1996). UU RI No.7 Tahun 1996 tentang Pangan